

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gagasan tentang relasi Islam dan negara selalu menjadi wacana aktual di Indonesia meskipun telah diperdebatkan beberapa tahun yang lalu, akan tetapi wacana ini selalu hangat pada momen-momen tertentu. Hampir bisa dipastikan ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.<sup>1</sup>

Kalangan Muslim secara umum terbagi dalam dua kelompok dalam wacana ini mereka yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan mereka yang menawarkan model negara sekuler. Kelompok pertama meyakini bahwa negara Islam sebagai model pemerintahan akan menjamin terlaksana ajaran Islam di masyarakat. Kelompok kedua menolak formalisme<sup>2</sup> agama dalam urusan kenegaraan, sebaliknya mereka memfokuskan pada pentingnya menumbuhkan dan membina masyarakat religius dan integrasi (penyatuan) bangsa.<sup>3</sup> Sejak Pancasila dijadikan dasar ideologi formal Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Soekarno, Pancasila menjadi bagian

---

<sup>1</sup>[Http://Dedisyapura.wordpress.com/2010/07/03/buah-pikiranefendy\\_%E2%80%99\\_Islam dan negara-transformasi-pemikiran-dan-praktek--politik-islam-di-indonesia](http://Dedisyapura.wordpress.com/2010/07/03/buah-pikiranefendy_%E2%80%99_Islam_dan_negara-transformasi-pemikiran-dan-praktek--politik-islam-di-indonesia) (12-11-2010)

<sup>2</sup>Formalisme adalah mengikuti bentuk-bentuk yang telah ditetapkan.

<sup>3</sup>Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 50-51

perdebatan politik yang tak terelakkan oleh Politikus dan Agamawan, khususnya Islam. Pada tahun 1950-1955 melahirkan sistem multi partai, ini merupakan kesempatan besar bagi partai Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai asas negara, akan tetapi apa yang dicita-citakannya masih belum bisa dicapai sampai sekarang. Hal yang sama terjadi pada tahun 1999 yang menggunakan sistem multi partai dan lagi-lagi Islam belum cukup kuat untuk meletakkan ideologi Islam sebagai dasar negara.<sup>4</sup>

Sebelumnya pada tahun 1978-1985 telah terjadi ideologisasi Pancasila yang diinstruksikan oleh Soeharto, dan kemudian menimbulkan perdebatan yang luar biasa di kalangan tokoh dan gerakan ideologi Islam. Insiden politik semacam itu sempat terulang kembali pada tahun 1990 di negeri ini, yakni mengenai perdebatan ideologi. Sebenarnya sumber perdebatan itu adalah relasi Islam dan negara,<sup>5</sup> khususnya mengenai sistem negara apa yang akan dipakai untuk membangun Indonesia, apakah beraskan Islam atau sekuler. Kalau kita telusuri, ternyata perdebatan mengenai hubungan negara dengan agama belum tuntas sampai sekarang dan masih sangat hangat dalam kancah pemikiran umat Islam. Hal ini karena dalam kancah pemikiran politik Islam pada umumnya hubungan keduanya merupakan produk “perdebatan besar” yang berfokus pada masalah religi tentang negara, pemerintahan dan agama.

Di kalangan pakar-pakar Islam mempunyai pandangan tersendiri mengenai masalah ini, misalnya Abul A’la al-Maududi berpandangan bahwa Islam bukanlah

---

<sup>4</sup>[Http://Dedisyapura.wordpress.com](http://Dedisyapura.wordpress.com), *Op. Cit*

<sup>5</sup>*Ibid.*

semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, tapi satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.<sup>6</sup> Begitu juga Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa: sesungguhnya mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, bahwa agama tidak tegak tanpa hal itu. Jadi, menyelenggarakan negara merupakan hal penting dalam pelaksanaan hukum syariat.<sup>7</sup> Bahkan imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak punya tiang akan roboh dan tidak dijaga akan hilang.<sup>8</sup> Sementara Ali Abdul Razziq dan Thaha Husein berpendapat bahwa Islam adalah agama, tidak ada kaitannya dengan urusan pemerintahan atau negara.<sup>9</sup> Begitu juga dengan Muhammad Husein Haikal bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi hanya terdapat seperangkat kata nilai etika bagi kehidupan bernegara.<sup>10</sup> Dalam konsep ke Indonesiaan hal ini juga dikemukakan Soekarno dengan memisahkan antara agama dan negara.

Menurut Soekarno, bahwa agama itu tidak ada hubungannya dengan negara karena tidak ada aturan-aturan bernegara. Kalau agama bersatu dengan negara maka

---

<sup>6</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara: Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta:UI Press, 1993), h.1

<sup>7</sup>Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syariyyah*, (Beirut:Darul Fikri,tth), h. 172-173.

<sup>8</sup>Al-Ghazali, *IhyaUlumuddin*, (Beirut: Darul Ma'rifah,t.th) jilid , h. 18

<sup>9</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara*, terj.Syafri Halim, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 32

<sup>10</sup>Munawir Sjadzli, *Op. Cit*

Indonesia akan hancur.<sup>11</sup> Persepsi Soekarno tentang agama adalah bahwa agama merupakan agama pribadi. Meski dengan penuh semangat Soekarno mengedepankan pemisahan Islam dan negara, namun “kerasnya” pandangan Soekarno itu tidak bersifat mendasar, tapi hanya akibat adu argumen dengan “golongan” Islam.<sup>12</sup> Dalam situasi seperti ini, sejumlah cendekiawan Muslim melontarkan pemikiran kreatif dan kritis, termasuk Abdurrahman Wahid.

Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa dalam Islam, negara itu adalah hukum (*al-hukmu*) dan Islam sama sekali tidak memiliki bentuk negara. Yang ada pada Islam adalah etik kemasyarakatan dan komunitas, Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif. Dalam persoalan yang paling pokok saja kata beliau seperti suksesi kekuasaan, ternyata Islam tidak konsisten, terkadang memakai *istikhlaf*, *bai'at* atau *ahlulhalli wal aqdi* (sistem formatur). Padahal menurut Abdurrahman Wahid, soal suksesi adalah masalah yang cukup penting dalam masalah kenegaraan, kalau memang Islam punya konsep tentu tidak terjadi demikian.<sup>13</sup>

Menurutnya Islam sebagai jalan hidup tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara, karena sepanjang hidupnya menurutnya telah mencari dengan sia-sia makhluk yang dinamakan negara Islam itu dan ia belum menemukannya jadi tidak salah jika ia simpulkan memang Islam tidak memiliki konsep bagaimana negara harus

---

<sup>11</sup>Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: Logos 1999), h. 123

<sup>12</sup>Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82

<sup>13</sup><http://mustari64.blogspot.com/2010/05/kh-abdur-rahman-wahid-hubungan-agama.html>  
(12-11-2010)

dibuat.<sup>14</sup> Dasar dari jawaban itu adalah tiadanya pendapat yang baku dalam dunia Islam tentang Islam yang tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian pemimpin.<sup>15</sup> Abdurrahman Wahid menolak wacana negara Islam atau menjadikan Islam sebagai dasar negara. Sikap ini dilandasi dengan pandangan bahwa Islam sebagai jalan hidup tidak memiliki konsep jelas tentang negara karena Islam tidak memiliki pandangan jelas tentang pergantian pemimpin, karena masing-masing dari Khulafaur Rasyidin memiliki karakteristik berbeda. Abu Bakar dipilih melalui sumpah setia (baiat) dari perwakilan suku. Sebelum beliau meninggal, menyatakan untuk mengangkat Umar Bin Khattab. Intinya Umar menjabat karena penunjukan pengganti seperti presiden menunjuk wakilnya sebagai pengganti. Setelah Umar memimpin sekian lama dan berakhir usianya, beliau mengamanatkan untuk membentuk dewan perwakilan yang terdiri dari sahabat-sahabat mulia. Akhirnya, Utsman Bin Affan dipilih oleh tujuh orang anggota dewan tersebut. Untuk selanjutnya, pergolakan muncul di masa pengangkatan Ali sebagai khalifah.<sup>16</sup> Menurut Abdurrahman Wahid jika Islam punya konsep pemerintahan, suksesi kepemimpinan tidak akan demikian adanya.

Kita ketahui Abdurrahman Wahid adalah seorang Kyai dan keturunan dari Ulama. Ternyata Abdurrahman Wahid yang dibesarkan dalam lingkungan ulama

---

<sup>14</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: The WAHID Institute, 2006), h. 81

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>[http://herigate.multiply.com/journal/item/4/Islamku\\_Islam\\_Andam\\_AgamaMasyarakat\\_Negara\\_Demokrasi](http://herigate.multiply.com/journal/item/4/Islamku_Islam_Andam_AgamaMasyarakat_Negara_Demokrasi) (12-11-2010)

yang *nota bene* orientasi politiknya berkiblat pada ulama Al-Ghazali ternyata mampu mengapresiasi pemikiran liberal yang cenderung seperti Ali Abd al-Raziq.

Beranjak dari masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana Pemikiran Abdurrahman wahid tentang relasi Islam dan Negara, dengan mengangkat masalah ini ke dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi dengan judul: “**Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia**”.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemikiran Abdurrahman Wahid tentang relasi Islam dan negara di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid tentang relasi Islam dan negara di Indonesia?

### **C. Definisi Operasional**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pemikiran adalah cara atau hasil berfikir.<sup>17</sup> Adapun pemikiran yang diinginkan penulis adalah hasil pemikiran atau pikiran, yang berarti sesuatu yang dipikirkan, Abdurrahman Wahid tentang hubungan Islam dan Negara.
2. Relasi adalah hubungan; perhubungan<sup>18</sup>. Adapun maksud hubungan disini ialah penulis menguraikan bagaimana hubungan Islam dan Negara itu menurut Abdurrahman Wahid. Apakah ada hubungannya antara Islam dan negara menurut Abdurrahman Wahid.
3. Negara adalah organisasi tertinggi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>19</sup> Yang dimaksud di sini adalah negara dalam pengertian Abdurrahman Wahid, negara itu bisa dihubungkan dengan Islam atau sebaliknya.

---

<sup>17</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982) hal, 753

<sup>18</sup>Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka) h. 964

<sup>19</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 685

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemikiran Abdurrahman Wahid tentang relasi Islam dan Negara di Indonesia.
2. Mengetahui pandangan Islam terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid tentang relasi Islam dan Negara di Indonesia.

#### **E. Signifikansi Masalah**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan Siyasah Jinayah baik khalayak banyak maupun penulis sendiri.
2. Bahan literatur untuk menambah khazanah literatur perpustakaan Syariah dan perpustakaan IAIN Antasari.
3. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan seperti ini dari aspek yang berbeda.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman penelitian, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian pustaka dengan memberikan gambaran yang berkaitan dengan masalah skripsi saya. Dalam hal ini penulis telah melakukan penelusuran terhadap buku, internet dan hasil penelitian ilmiah mahasiswa baik pada jurusan Siyasah Jinayah maupun Fakultas Syari'ah. Pada intinya, penulis tidak menemukan hasil yang

sama dengan masalah skripsi saya. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki tema yang sejenis dengan tema permasalahan yang penulis kaji, tentang konsep Agama dan Negara menurut Muhammad Natsir, oleh saudara ; Kamal Ansyari NIM 0301135735 jurusan Siyasa Jinayah, disini saudara Kamal Ansyari lebih memaparkan penelitian menurut tokoh Muhammad Natsir yang isinya tentang penyatuan agama dan negara menurut Muhammad Natsir, sedangkan penulis memaparkan tentang Relasi Islam dan Negara menurut Abdurrahman Wahid di Indonesia.

Adapun melalui internet penulis menemukan yang judulnya “Diskursus Pemikiran Politik Islam di Indonesia” (*Studi Pemikiran M. Natsir dan Abdurrahman Wahid tentang Relasi Islam dan Negara*),” oleh Ahmad Anfasul Marom yang mana di dalamnya memaparkan perbandingan pemikiran antara dua tokoh tersebut tentang relasi Islam dan negara dan melalui buku penulis menemukan buku yang berjudul Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis (2001), karangan Kamaruzzaman yang berisi pokok-pokok Pemikiran M. Natsir yang diklaim sebagai tokoh modernis Indonesia untuk konsep politik, sedangkan penulis meneliti pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengkaji dan menelaah secara intensif buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Primer

- 1) *Agama dan Kekerasan* karangan Abdurrahman Wahid
- 2) *Goro-goro Dalam Lakun Multi Krisis* karangan Abdurrahman Wahid
- 3) *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* karangan Abdurrahman Wahid
- 4) *Mengurai Hubungan Agama dan Negara* karangan Abdurrahman Wahid

### b. Sumber Sekunder

- 1) *KH. Abdurrahman Wahid Biografi singkat 1940-2009* karangan Muhammad Rifai
- 2) *Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam* karangan M. Natsir
- 3) *Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif* karangan Syaiful Arif
- 4) *Gus Dur Santri Par Excellence* karangan Zuhairi Misrawi
- 5) *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur* karangan Dr. Ali Masykur Musa
- 6) *Membaca pikiran Gus Dur Dan Amien Rais Tentang Demokrasi* karangan Umaruddin Masdar.
- 7) *Kenyelenehan Gus Dur* karangan Zainal Arifin Thoha

### c. Sumber Tersier, yaitu beberapa kamus-kamus.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu mengunjungi berbagai perpustakaan untuk mendapat data-data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah data-data yang ada untuk diuraikan.

### 4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan teknik sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
- b. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap data yang telah diuraikan sehingga mudah dipahami.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini dapat disistematisasikan menjadi 4 bab pembahasan, yaitu:

*Bab Pertama*, yaitu diskripsi tentang hal yang menjadi minat penulis untuk mengangkat tulisan ini. Pada bab ini terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang yaitu menguraikan permasalahan mendasar mengenai pemikiran Abdurrahman Wahid tentang relasi Islam dan negara di Indonesia. Selanjutnya disusunlah rumusan masalahnya mengenai pemikiran Abdurrahman Wahid tentang

relasi Islam dan negara di Indonesia serta pandangan Islam terhadap pemikiran Abdurrahman wahid tentang relasi Islam dan negara di Indonesia, selanjutnya definisi operasional, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab kedua* penulis menguraikan telaah tentang tinjauan umum tentang relasi Islam dan negara di Indonesia. Pada bab ini penulis membagi pada beberapa sub bab diantaranya meliputi paradigma dan awal perdebatan Islam dan negara di Indonesia. Serta bibliografi dan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang relasi Islam dan negara di Indonesia.

*Bab ketiga* berisi analisis terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid tentang relasi Islam dan negara di Indonesia yang mendiskripsikan pemikiran Abdurrahman Wahid, serta analisis pandangan Islam terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid tentang relasi Islam dan negara di Indonesia dengan bahasa penulis dengan ditambah dari literatur.

*Bab keempat* yaitu penutup yang memuat simpulan dan saran.

